

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BAPEMAS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOA RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hendy Pramudi¹

Abstrak

Hendy Pramudi, 2015, "Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara". Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Ibu Dra. Rita Kala Linggi, M.Si

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Jenis penelitian yang akan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan disini adalah kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi analisis data sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014:31-33)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Loa Raya sudah menjalankan peranannya. Hal tersebut dapat dilihat dari penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan, pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan desa, berusaha meningkatkan LSM desa, memberikan pelatihan secara berkala terhadap aparatur desa dan meningkatkan sarana prasarana fisik pada Desa Loa Raya. Namun dalam menjalankan peranannya tersebut Bapemas masih dijumpai adanya kendala, yaitu terbatasnya kemampuan APBD dan SDM dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program - program yang ada pada badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa Loa Raya yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai. Ketiga rendahnya motivasi masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan, Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal karena kurangnya SDM perangkat desa, dan kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya.

Kata kunci : Peran Bapemas, Pemberdayaan Masyarakat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hendy_pramudi@yahoo.co.id

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *grand strategy* pembangunan yang disebut GERBANG RAJA. Gerbang Raja menjadi suatu konsepsi mengenai gambaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masa depan, secara filosofis Gerbang Raja menjadi ciri khas atau model pendekatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai pengaruh utama pembangunan (*mainstream development*) yang mewarnai seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Dalam rangka penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya rencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, sehingga sekarang perlu disusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Maka dari itu pemerintah mengadakan proses pemerataan akses kesempatan bagi masyarakat pedesaan yang merupakan bagian dari upaya penguatan kemampuan masyarakat untuk memperluas pilihan-pilihan baik dalam proses kegiatan maupun pemanfaatan hasil pembangunan di samping itu juga masyarakat di harapkan agar dapat berperan dan ikut serta di dalam pembangunan.

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik dan sebagai penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa. Lahirnya Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) harus mempunyai kemampuan yang tinggi untuk dapat melakukan pendampingan secara aktif serta melakukan pengenalan kepada masyarakat tentang program-program yang dapat dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat Desa, proses intervensi

pembangunan bagi masyarakat pedesaan telah menjadi salah satu fokus pembangunan nasional, seperti termuat dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dimana salah satu agendanya adalah industrialisasi dan modernisasi ekonomi pedesaan. Dalam jangka pendek, peluang implementasi industrialisasi dan modernisasi ekonomi pedesaan lebih besar bila dilakukan di desa-desa tertentu yang memiliki kriteria sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Kriteria utama DPP adalah daerah yang memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa, seperti: pasar, industri kecil/rumah dan pusat-pusat pelayanan jasa lainnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitian Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Sebagai bahan masukan bagi Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan program dari kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur baik dalam mencapai tujuan.
3. Untuk menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam bidang penelitian, memperdalam pengalaman serta menambah ilmu dalam penelitian yang lebih luas dimasa mendatang.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Ekspektasi peran didefinisikan sebagai kepercayaan/harapan orang lain tentang tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam sebuah situasi tertentu. Makmuri Muchlas (2005:253). Menurut Sulistiyani (2004:97) dalam rangka

pemberdayaan perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan.

Levinson dalam Soerjono Soekanto (2002:213) peran mungkin mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembangunan Desa

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengandemikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam artifisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi sebagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat penyusun untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:79) berpendapat pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya juga menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*Charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Akar pemahaman yang diperoleh dari diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sondang P. Siagian (2002:258) adalah :

- a. Diperlukan sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar.
- b. Dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, bukan hanya tugas serta jabatan, akan tetapi meliputi kehidupan orang pada umumnya.
- c. Melakukan pekerjaan yang menarik, menantang dengan identitas yang jelas.
- d. Adanya kebebasan bertindak, menyusun rencana, menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan, serta menentukan sendiri solusi mengenai permasalahan yang dihadapi.
- e. Kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, mempunyai kemampuan operasional yang efektif.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan Menurut Tjokowinoto (2005:16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya : ''Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat. Dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan di bidang ekonomi adalah usaha menjadi ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedangkan pemberdayaan di bidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan dibidang sosial dan budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas''.

Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Latar belakang dibentuknya BAPEMAS

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai derivasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan disyahnkannya Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai kartanegara, sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah. Sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Perda Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman RPJMD.

Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27), sehingga sekarang perlu disusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

Tujuan Bapemas

- a. Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dari kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan.
- b. Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun.
- c. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program /kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tugas Dan Fungsi Bapemas

- a. Kedudukan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah , dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

- b. Tugas Pokok, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa melaksanakan Tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, Melakukan koordinasi,intergrasi,Sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Program Pemerintahan Desa.
- c. Fungsi - Fungsi :
 - 1) Penyusunan Rencana penjabaran mengatur pelaksanaan program, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan melakukan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat pada Desa/Kelurahan.
 - 2) Koordinasi kebijakan, perumasan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan Bina pemerintahan Desa dan kelurahan, Bina kelembagaan dan partisipasi Masyarakat dan Bina Pemberdayaan Adat dan kehidupan sosial Budaya, Bina usaha Ekonomi kerakyatan, Bina Sumber daya Alam (SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG) serta Bina Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan Program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan yang telah dicapai maupun program yang sedang dilaksanakan.
 - 4) Pelaksanaan, penyelenggaraan Administrasi dan secretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Definisi Konseptional

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya dengan cara mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dengan cara :
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat desa
 - b. Meningkatkan LSM desa
 - c. Memberdayakan lembaga organisasi masyarakat perdesaan.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pada desa.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggara Seberang merupakan *political will* pemerintah BAPEMAS dalam bentuk implementabilitas kebijakan yang terdiri dari sifat kepentingannya, manfaat, perubahan perilaku yang diinginkan, aparat/aparatur pelaksana, dan dukungan sumber daya untuk bisa melatih aparat/aparatur desa menjadi pemandu yang bisa mewujudkan kemandirian masyarakat desa dengan cara :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti tentang Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Peran BAPEMAS di dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - a. Pelaksanaan program desa/kelurahan dimana peran masyarakat diutamakan.
 - b. Koordinasi antar lembaga desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program desa/kelurahan.
 - c. Mengadakan pelatihan terhadap aparat/aparatur desa/kelurahan dalam melaksanakan program perdesaan.
2. Faktor yang menghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Struktur kelembagaan .
 - c. Alokasi anggaran pelaksanaan program perdesaan.
 - d. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program perdesaan.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang diperoleh melalui informan antara lain:
 - a. Sekretaris Bapemas.
 - b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Bapemas.
 - c. Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Bapemas.
 - d. Kepala Bagian Keuangan dan Verifikasi Bapemas.
 - e. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Bapemas.

- f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapemas..
- g. Kepala Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- h. Kepala Desa atau Lurah.
- i. Anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- j. Tokoh Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan
2. Pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi di Desa Loa Raya dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilaksanakan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman itu.
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi.

Hasil Penelitian

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam penelitian ini, hasil penelitian mengenai peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibagi atas 3 pokok hasil penelitian tentang rencana program dan kegiatan Bapemas, terselenggaranya pembinaan, Pengarahan dan pengawasan

tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat serta faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Bapemas, sebagai berikut :

Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Bapemas

Berdasarkan program pada tahun 2015 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Desa Loa Raya.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Desa Loa Raya.
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- f. Program Program peningkatan partisipasi masyarakat.
- g. Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan.

Pembinaan dan Pengarahan Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Sasaran Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya masing-masing.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Ada beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Desa antara lain :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknologi tepat guna dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa.
2. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan peranan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.
3. Mengumpulkan, mengolah data, merencanakan, melaksanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya.
4. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran.
5. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun merencanakan dan melaksanakan pengembangan pemerintahan desa.

6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik dan pementapan kewapadaan dini dan kerjasama intelejen kemanan.

Pengawasan Implementasi Tugas pokok dan Fungsi Bapemas

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara kedalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah.

Faktor Kendala-Kendala Yang Dihadapi

a. SDM di Bapemas dan Aparat Pemerintahan Desa Loa Raya

Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Loa Raya baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

b. Dana

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bapemas sebagai berikut:

1. Kendala Internal

- a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai.
- c. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara masih lemah dan masih terlihat tumpang tindih program.
- d. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi salah satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnyapun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan.
2. Kendala Eksternal
 - a. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :
 - Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa Loa Raya masih rendah.
 - Kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.
 - Rendahnya motivasi masyarakat Desa Loa Raya untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan.
 - Keberadaan lembaga perekonomian desa Loa Raya belum berfungsi secara maksimal.
 - Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya.
 - Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa Loa Raya.
 - b. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah.
 - c. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain pada Desa Loa Raya. Hal ini dikarenakan antara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian hari justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang.
 3. Tantangan internal.
 - a. Terbatasnya dan rendahnya kinerja pelayanan disektor pemberdayaan
 - b. Lemahnya koordinasi adalah salah satu penyebab kegagalan dalam kinerja pelayanan.
 - c. Rendahnya motivasi aparatur Desa Loa Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Rendahnya motivasi aparatur Pemerintahan Desa/kelurahan Loa Raya dalam pembangunan Perdesaan.
 - e. Rendahnya motivasi kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Loa Raya.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik, memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang melalui :
 - a. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan untuk mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis agar terlaksana sesuai harapan yang telah ditetapkan.
 - b. Analisis Kinerja dan Pelayanan Bapemas, hal ini dilakukan sebagai upaya perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang dan tugasnya, selanjutnya sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - c. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapemas, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ini diarahkan untuk mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan efektifitas serta tercapainya tujuan program.
 - d. Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Desa Loa Raya, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :
 - a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program - program yang ada pada badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa Loa Raya yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai.
 - c. Kendala Internal dan Eksternal : Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa Loa Raya relatif masih rendah, Kemampuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan belum merata, Rendahnya motivasi masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan, Keberadaan

lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal, Kurangnya SDM perangkat desa, dan Kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Loa Raya perlu dioptimalkan lagi, baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, Anggaran dan Pembiayaan Program yang masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang kurang mendukung, serta Partisipasi Masyarakat yang cenderung masih rendah.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang panjang, perlu adanya pertemuan atau bimbingan rutin hingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti dengan tujuan program. Keuletan, ketelitian, keseriusan dan kesabaran serta keprofesionalan adalah bagian dari faktor keberhasilan dalam proses program pemberdayaan.
3. Untuk dapat lebih melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang dapat digunakan melalui pelatihan , seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Perlu Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan personil untuk penempatan pegawai di Bapemas.
5. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran Tahun selanjutnya.
6. Perlu merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alexander. 1994. Pembangunan dalam Partisipasi Masyarakat. Jakarta, Mandar Jaya.
- Ali, Madekhan. 2007. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Bina Rena Priana.
- Dwipoyana, 2001. Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Haeruman, 1997. Manajemen Pembangunan untuk Negara BERkembang. Jakarta. LP3S.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Utama, Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2001. Administrasi pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktisnya di Indonesia. Penerbit LP3ES, Jakarta.

- Midgley, James. 1995. *Social Development.: The Development Perspective in Social Welfare*. London, Sage Publication.
- Miles, Methew. B. dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang Metode-metode baru*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Potres. 1996. *Konsep Pemberdayaan dalam Pembangunan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Purwono, 2000. *Akuntnasi lingkungan suatu Tinjauan dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Prospek Penerapannya di Indonesia*. Universitas Negeri Surakarta, tidak dipublikasikan.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Penerbit. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sulistriyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Penerbit Dava Media. Yogyakarta.
- Sukirmo, 1995. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeto.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit. Citra Utama Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Propinsi Kaltim.Samarinda, Desember 2002*.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Gravindo Persada: Jakarta.
- Tikson, T. Dedy. 2005. *Pembangunan Nasional*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tjokowinoto. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Tesis. Jakarta, Fisip Universitas Indonesia.
- Tjiptono, Fandi. 2006. *Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Kota*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengenai Desa.

Sumber Lain:

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2001. *Rentra BAPEMAS tahun 2011-2015*. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.